



## Discourse on Cultural Islam and Political Islam in the History of Indonesian Islam

Hairus Saleh

*UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*

*Email: hairus.saleh@uingusdur.ac.id*

Submitted: 07 December 2023	Revision Required: 18 Mey 2024	Published: 15 June 2024
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

### Abstract

The dynamics of Cultural Islam and Political Islam still occur and are actual in people's lives today. Several Political Islam groups with their voices through Islamic parties want to make Islam the basis of ideology and Indonesia a religious state. Meanwhile, the Cultural Islam group with a missionary spirit that wants to establish Islam as life values that blend with culture and also anti-sectarianism rejects the idea of Political Islam. Cultural Islam holds the view that the implementation of Islamic teachings in the state does not have to be in the form of formal Islamic principles, but rather at the level of Islamic meaning and behavior in Muslim society. Cultural Islam is the middle point of the debate between political Islam and secular nationalists. This research, when viewed from the perspective of the data source, can be categorized as a literature review. If viewed from an analytical perspective, this research is considered qualitative research. Meanwhile, if we look at the purpose of conducting it, this research can be categorized as analytical descriptive research. This research aims to find out the extent of cultural Islamic discourse and political Islam in the history of Indonesian Islam.

**Keywords:** *Cultural Islam, political Islam, history of Indonesian Islam*

## **Abstrak**

Dinamika Islam Kultural dan Islam Politik masih terjadi dan mengaktual dalam kehidupan Masyarakat hingga saat ini. Beberapa kelompok Islam Politik dengan suara mereka melalui parta-partai Islam ingin menjadikan Islam sebagai basis ideologi dan Indonesia sebagai negara agama. Sementara itu, kelompok Islam Kultural dengan semangat dakwah yang ingin membumikan Islam sebagai nilai-nilai kehidupan yang membaur dengan kebudayaan juga anti sektarianisme menolak gagasan Islam Politik. Islam kultural berpandangan bahwa implementasi ajaran islam dalam negara tidak harus dalam bentuk asas-asas formal islam, melainkan pada tataran makna dan perilaku Islami masyarakat muslim Islam kultural ini merupakan titik tengah perdebatan antara Islam politik dan nasionalis sekuler. Adapun penelitian ini jika dilihat dari sudut pandang sumber datanya, dapat dikategorikan sebagai kajian pustaka. Jika dilihat dari perspektif analisisnya maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif. Sedangkan kalau dilihat dari tujuan penyelenggaraannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana diskursus Islam kultural dan Islam politik dalam sejarah Islam Indonesia.

**Kata Kunci:** *Islam kultural, Islam politik, sejarah Islam Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang majemuk yaitu yang terdiri dari berbagai ras, bahasa, kebudayaan, suku, agama dan kepercayaan hidup di negeri ini. Yang mana Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” merupakan ungkapan yang tepat untuk menjelaskan realitas sekaligus harapan bangsa ini. Walaupun berbagai ragam budaya, bahasa, ras, suku, agama dan kepercayaan hidup namun Indonesia tetaplah satu, tetap merasa saling memiliki, saling menghargai satu sama lain. Pendapat Blaise Pascal yang dikutip oleh Harold Coward, pluralisme yang tidak diintegrasikan dalam bentuk kesatuan (unity) adalah kekacauan (chaos), sedangkan kesatuan yang tidak menjaga pluralitas adalah tirani (tyranny) (Harold Coward 1997).

Salah satu persoalan mendasar yang ingin dipecahkan secara tuntas oleh para intelektual muslim adalah menyangkut hubungan Islam dan Negara ( dasar negara Indonesia) dari masa orde lama hingga orde baru. Namun terdapat kesulitan dalam mencari hubungan

antara Islam dan negara, bangsa atau berwawasan kebangsaan sebab seakan-akan sifat Islam itu suprarasional. Sebagaimana semua agama, Islam menjangkau kemanusiaan secara universal tidak peduli asal-usul etnisnya (Abdurrahman Wahid 1989). Kemudian asumsi ini melahirkan semacam kewajiban bagi pemeluk Islam untuk mendirikan negara Islam. Tapi Ironisnya, negara Islam diteorisasikan sebagai negara Tuhan atau kerajaan Tuhan di alam bumi yang komponen-komponennya adalah umat Islam, hukum Islam (syari'ah), dan khalifah sebagai bayangan Tuhan di muka bumi (Umaruddin Masdar 1999).

Situasi hubungan antara Islam dan negara di Indonesia tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami kawasan dunia Islam lainnya. Untuk waktu yang agak lama, sejarah Islam kontemporer ditandai dengan kemandegan politik (political stagnation) dalam hubungannya dengan negara. Islam Politik (political Islam) pernah dianggap sebagai lawan (rival) kekuasaan yang dapat mengusik atau mengubah basis kebangsaan negara. Ketegangan ini baru bisa dikatakan relatif berhenti, setelah semua ormas Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi pada pertengahan tahun 1980-an. Sedangkan ormas yang pertama kali menerima Pancasila adalah NU melalui MUNAS Ulama NU di Situbondo pada 21 Desember 1983 (Einahar Sitompul 1989).

Beragam budaya dan agama berkembang dalam masyarakat, yang mana keduanya tak jarang lebur dan terjadi akulturasi. Akulturasi tersebut seringkali menyebabkan berbagai hal yang dapat membingungkan orang untuk membedakan mana yang produk agama, dan mana yang merupakan produk budaya. Walaupun antara agama dan budaya tidaklah dapat dipisahkan, tetapi juga telah diinsafi oleh banyak ahli, agama dan budaya itu, meskipun tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan, dan tidak dibenarkan mencampuradukkan diantara keduanya. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Tetapi budaya, sekalipun yang berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat. Sementara kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu agama berdasarkan agama

Untuk membedakan dan memisahkan antara budaya dan agama, maka diperlukan pembaharuan. Dalam pandangan Nurcholis Madjid, pembaruan harus dimulai dari dua hal yang saling erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan (Nurcholis Madjid 2008). Menurut Nurcholis Madjid, dorongan melakukan pembaruan inilah yang mengandung konotasi, bahwa kaum muslim Indonesia sekarang ini telah mengalami kejumudan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam, dan kehilangan kekuatan secara psikologis perjuangannya.

Ide pembaruan dalam pemikiran Islam hanya dapat mungkin diterangkan, jika seseorang dapat secara historis-kritis mengamati perkembangan pemikiran Islam dalam hubungannya dengan konteks sosial-budaya yang mengitarinya. Tanpa mengaitkan dengan konteks tidak pernah ada pembaruan. Teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah akan tetap seperti itu adanya, sedang alam, peristiwa-peristiwa alam, peristiwa-peristiwa ilmu dan teknologi akan terus menerus berkembang tanpa mengenal batas yang final (M. Amin Abdullah 2006).

Oleh kerana itu, dalam makalah ini akan membahas tentang dua wajah Islam yaitu Islam Kultural dan Islam Politik, yang telah berkembang diberbagai belahan dunia Muslim termasuk di Indonesia.

Cultural Islam dan Political Islam adalah dua istilah populer yang telah berkembang didunia Islam termasuk Indonesia. Dalam bahasa Malaysia dan Indonesia, Political Islam lebih dikenal dengan sebutan Islam politik, yang umumnya diperhadapkan dengan Cultural Islam yang disebut dengan Islam kultural. Penggunaan dua Istilah ini menunjukkan adanya dua jenis Islam yaitu Islam politik dan Islam kultural.

## **METODELOGI**

Jika dilihat dari sumber datanya, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sebagai mana dikatakan oleh Kun Zachrun Istanti bahwa penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari dan meneliti naskah-naskah, artikel-artikel ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, baik yang tersimpan di perpustakaan maupun di museum (Kun Zachrun Istanti 2010).

Dilihat dari perspektif analisisnya maka penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Subroto (Edi Subroto 2007) adalah metode pengkajian atau metode penelitian suatu masalah yang tidak didesain atau dirancang menggunakan prosedur-prosedur statistik. Sedangkan menurut Eko Sugiarto penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedural statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Eko Sugiarto 2015).

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Sejarah. Louis Gottschalk mengatakan bahwa pendekatan ini terdiri dari 4 langkah di antaranya adalah heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi (Louis Gottschalk 1975). Heuristik dengan kata lain dapat diartikan sebagai kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Dalam penelitian ini, penulis lebih banyak berkonsentrasi mengumpulkan sumber tertulis.

Verifikasi adalah penilaian kritis terhadap data dan fakta sejarah yang ada. Bukti sejarah adalah kumpulan fakta-fakta dan informasi yang sudah divalidasi yang dipandang sudah terpercaya sebagai dasar yang baik untuk menguji dan menginterpretasi suatu permasalahan. Pada tahap ini, sumber dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya (heuristik) yang berupa buku-buku ataupun berupa hasil temuan dilapangan mengenai bukti-bukti pembahasan, untuk selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada.

Interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, buku-buku yang relevan dengan pembahasan, maupun hasil penelitian langsung dilapangan. Sedangkan Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.

## **PEMBAHASAN**

### ***Persentuhan Islam dan Politik di Indonesia***

Jika menelisik kembali sejarah kedatangan Islam berikut proses Islamisasi di Nusantara, maka dapat diketahui kapan jejak persentuhan

Islam dan politik di Indonesia. Kedatangan Islam pertama kali yang dimungkinkan pada abad ke-7 M dan kemudian pengaruhnya mulai kelihatan nyata di sekitar abad 12 M-16 M memberikan serangkaian fakta mengenai persentuhan Islam dan politik di Indonesia. Proses Islamisasi yang memiliki banyak saluran, diantaranya melalui perdagangan, pernikahan saudagar Muslim dengan pribumi, budaya, pendidikan, tasawuf, termasuk politik (Didin Saefuddin Buchori 2009) menjadi beberapa faktor penyebab Islam sebagai agama dominan di Indonesia hingga saat ini.

Saluran Islamisasi melalui politik dibuktikan dengan beberapa kerajaan di Nusantara yang bercorakkan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut tersebar di beberapa kepulauan Indonesia, di antaranya Kerajaan Perlak, Samudera Pasai, Kesultanan Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Mataram, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, serta Gowa dan Tallo. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam. Demikian pula di Sumatera dan Jawa, kerajaan Islam justru memerangi kerajaan yang bukan bercorakkan Islam, sehingga ketika kerajaan Islam mendapatkan kemenangan penduduk kerajaan yang kalah tertarik untuk masuk Islam (Badri Yatim 2010).

### ***Perkembangan Politik Islam di Indonesia***

Relasi Islam dan politik di Indonesia senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Umat Islam sebagai penduduk mayoritas merasa perlu untuk berpartisipasi aktif di bidang politik. Aspirasi Muslim terhadap politik memiliki sejarah dan jejak perkembangan yang panjang dalam pentas perpolitikan Indonesia, dari masa kerajaan Islam hingga Era Reformasi. Namun di bawah ini penulis membatasi perkembangan sejarah politik Islam hingga masa Orde Baru untuk mengantar pada pembahasan mengenai Islam kultural.

#### ***Pra-Kemerdekaan***

Kedatangan Belanda di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 menjadi babak pembuka penderitaan bangsa Indonesia. Beralihnya motif Belanda dari kepentingan ekonomi menjadi kolonialisasi di abad ke-17 sampai abad ke-18 (Didin Saefuddin Buchori 2009), memunculkan berbagai reaksi dari penduduk pribumi. Penduduk

Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan kenyataan yang harus diterima oleh Belanda. Berbagai perlawanan seperti perang Paderi di Minangkabau (1821-1827), perang Diponegoro yang terjadi di Jawa (1825-1830), perang Aceh (1837-1903), dan perang lainnya tidak terlepas dari sendi Islam (Zaprul Khan 2013).

Pada tahun 1905, terdapat gerakan pembaharuan agama yang diprakarsai oleh komunitas Arab di Batavia, yaitu *Jam'iyat Khair*. Perserikatan ini mendirikan sekolah yang mendatangkan gurunya dari kalangan Islam modernis yang bernama Syekh Ahmad Surkati. Menyusul kemudian, gerakan dari al-Irsyad yang dibentuk oleh Surkati pada tahun 1915. Gerakan ini mendirikan sekolah yang sebagian besar muridnya keturunan Arab dan sebagiannya lagi penduduk pribumi (M.C. Ricklefs 2001).

Reaksi lainnya atas kolonialisme Belanda adalah berdirinya organisasi Budi Utomo yang digagas oleh Dr. Wahidin. Pendiri organisasi ini menganggap bahwa salah satu faktor kemunduran masyarakat Jawa adalah kedatangan Islam (M.C. Ricklefs 2001). Gagasan-gagasan Budi Utomo bertolak pada pemimpin India, Tagore dan Ghandi, yang dijadikan sebagai teladan dalam kebangkitan nasional. Namun, penduduk Indonesia lebih banyak yang terpengaruh dengan cita-cita yang didasarkan pada prinsip Islam (Bernard H. M. Vlekke 2008). Oleh karena itu, tampak juga pergerakan-pergerakan nasionalis di Jawa. Kelompok-kelompok Islam reformis seperti Serekat Islam dan Muhammadiyah yang didirikan tahun 1912, mewakili tindakan-tindakan yang berdasarkan pergerakan massal (Adam Scharz 2000). Masa ini disebut-sebut dengan masa kebangkitan nasionalisme Indonesia.

SI (Serekat Islam) berkembang menjadi organisasi politik Indonesia yang menuntut kemerdekaan penuh atas Indonesia (Sukron Kamil 2013). Organisasi ini dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto yang sebelumnya dipegang oleh Samanhudi atas dorongan Tirtoadisurjo (M.C. Ricklefs 2001). Gerakan SI memiliki misi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Muslim (Zaprul Khan 2013), maka tidak heran jika pada perjalanannya organisasi ini memiliki pengikut yang banyak dan berkembang pesat. Pada tahun 1919, SI menyatakan memiliki 2 juta anggota, meskipun jumlah sebenarnya tidak lebih dari setengah juta orang (M.C. Ricklefs 2001). Namun, kepopuleran SI tidak

bisa dipertahankan di tahun 1920 dalam meraih kemerdekaan, selain itu muncul perpecahan disebabkan permasalahan internal dalam tubuh SI sendiri (Sukron Kamil 2013).

Selanjutnya, Muhammadiyah sebagai kelompok Islam reformis yang diprakarsai oleh KH Ahmad Dahlan dengan cepat gagasan-gagasannya diterima dan menjadi populer.(Greg Barton 2002) Pengalaman KH Ahmad Dahlan yang pernah masuk dalam keorganisasian Budi Utomo dan pengamatannya terhadap organisasi Islam lainnya seperti Serekat Islam dan *Jam'iyat Khair* menjadi latar belakang terbentuknya Organisasi Muhammadiyah. Organisasi yang dibentuknya tersebut diwujudkan untuk masyarakat pribumi yang mengedepankan gerakan modernisme Islam. Pada tahun 1920, organisasi Muhammadiyah telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, diantaranya Minangkabau, Pekalongan, Surabaya, Bengkulu, Banjarmasin, Amuntai, Aceh dan Makassar (Didin Saefuddin Buchori 2009).

Pada tahun 1920-an, lahir pula organisasi pembaharuan Islam, yaitu Persatuan Islam (Persis) dan NU (Nahdhatul 'Ulama). Persis yang dibentuk oleh KH Zamzam ini lahir pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi ini tidak terlalu bergairah untuk menambah banyak anggota. Kegiatan Persis lebih mengutamakan dakwah lisan dan tulisan, seperti menerbitkan buku dan majalah, ceramah, dan aktif di media massa (Didin Saefuddin Buchori 2009). Selanjutnya, organisasi NU lahir di tahun 1926 yang didirikan oleh KH Wahab Hasbullah dan didukung oleh KH Hasyim Asy'ari. Lahirnya organisasi ini dilatarbelakangi oleh keengganan terhadap kaum modernisme dan hendak membela kepentingan kaum tradisional. Gerakan organisasi ini cukup pesat, pada tahun 1942, sudah memiliki 120 cabang di Jawa dan Kalimantan Selatan (M.C. Ricklefs 2001). Kemudian di tahun 1930, muncul organisasi pembaharu Islam di Bukittinggi yang bernama Perti (Pergerakan Tarbiyah Islamiyah) (Faisal Ismail 1995).

Seiring dengan perkembangan pergerakan Muslim, dan pada tahun 1926 dengan ditumpasnya pemberontakan PKI dan ketidakaktifan lagi SI, Soekarno dan Algemeene mendirikan sebuah partai politik baru. Politik tersebut bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang menuntut kemerdekaan Kepulauan Indonesia dengan

cara nonkooperatif dan dengan organisasi massa (M.C. Ricklefs 2001). Dengan adanya partai PNI, menunjukkan bahwa terdapat dua ideologi nasionalisme di Indonesia. Partai PNI mewakili nasionalis sekuler dan SI mewakili nasionalis Islam (Zaprul Khan 2013).

Setelah Belanda ditumbangkan oleh Jepang pada tahun 1942, penjajah Jepang melihat bahwa kaum santri bisa membantu mereka dalam hal administrasi wilayah Indonesia. Mereka juga berasumsi bahwa orang-orang yang disekolahkan oleh Belanda tentu akan bersimpati pada Belanda dan Eropa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepercayaan, Jepang memihak kepada santri (Greg Barton 2002). Selama masa penjajahan Jepang (1942-1945), kekuatan politik Islam semakin menguat. Hal ini karena kebijakan-kebijakan Jepang yang memberikan ruang kepada Muslim Indonesia untuk mengekspresikan kegiatan keagamaannya. Dukungan lainnya yaitu adanya pengangkatan pribumi menjadi *sanyo*, atau jabatan politik pada tiap-tiap departemen Indonesia (Zaprul Khan 2013). Selain itu, kebijakan-kebijakan Jepang lainnya yang sangat berpengaruh besar adalah pembentukan kantor urusan agama (Shumubu), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Hizbullah (Sukamto 2008).

#### *Pasca Kemerdekaan: Orde Lama*

Adanya paham nasionalis sekuler yang digagas oleh Soekarno dan teman-temannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak lepas dari hambatan. Gagasan yang lebih mengutamakan nasionalisme ketimbang ideologi ini (M.C. Ricklefs 2001) mendapat pertentangan dari golongan Islam. Mereka menentang pandangan yang menempatkan Islam berada di bawah payung kebangsaan (Faisal Ismail 1995). (Sukron Kamil 2013) Menanggapi gagasan nasionalis Islam, seperti yang dikutip Sukron Kamil, Soekarno menjelaskan bahwa paham nasionalismenya bukan seperti corak Barat, akan tetapi corak ketimuran yang toleran, tidak agresif, yang hidup dalam kedamaian atas kehadiran Tuhan Yang Agung (Sukron Kamil 2013).

Perbedaan adanya dua kelompok tentang dasar negara semakin nampak pada perumusan sila pertama (Sukamto 2008). Meskipun para pendiri bangsa ini telah menerima Pancasila sebagai dasar negara, sebagian Muslim lainnya meminta agar posisi Islam tercantum dalam konstitusi negara, yang mana aspirasi mereka ini dikenal dengan

Piagam Jakarta dengan adanya penambahan kata-kata “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya.” Piagam Jakarta ini sempat disetujui untuk dimasukkan ke dalam UUD 1945, namun ditentang oleh kaum nasionalis (Ahmad Fuad Fanani 2013) dan akhirnya piagam tersebut tidak dicantumkan demi kesatuan bangsa Indonesia (Faisal Ismail 1995).

Peristiwa tersebut menjadikan sejumlah kelompok Islam merasa kalah dan dikhianati. Maka muncullah berbagai pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Sukron Kamil 2013). Di Jawa Barat, pada tahun 1949, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo dan gerakan *Darul Islam*-nya melawan pemerintah pusat. Kemudian tepat pada tanggal 7 Agustus 1949, ia memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII) dan menyatakan bahwa dirinya sebagai Imam. Pada tahun 1952, Kahar Muzakkar yang berada di Sulawesi Selatan menyatakan penegakan sebuah negara Islam atas komando Kartosuwirjo. Perlawanan serupa juga terjadi di Aceh di bawah pimpinan Daud Beureueh yang juga mengajukan kepada pemerintah pusat (Faisal Ismail 1995).

Adanya pemberontakan-pemberontakan tersebut tidak mengganggu hubungan baik antara Islam dan negara. Namun, kesepakatan yang terjadi pada 18 Agustus 1945 belumlah matang. Sehingga, persoalan negara sebagai dasar ideologi mencuat kembali selama masa kampanye pemilu 1955 (Islam diwakilkan oleh Masyumi, NU, dan PSII) dan dalam perdebatan Majelis Konstituante. Majelis Konstituante dibuat untuk menyusun konstitusi permanen (Greg Barton 2002). Dalam sidangnya Majelis Konstituante, tugas-tugasnya dalam menyusun konstitusi sebenarnya sudah diselesaikan 90%, diantaranya HAM, bentuk pemerintahan dan prinsip-prinsip kebijakan negara. Namun, permasalahan dasar negara yang berideologikan Islam atau bukan, tidak menemukan ujung kesepakatan. Hingga pada 2 Juni 1959 perdebatan tersebut menemukan keputusannya yang mana kedua kelompok tersebut sepakat bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara (Sukron Kamil 2013).

Di masa berikutnya, pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno memiliki porsi yang besar dalam memimpin bangsa. Hubungan Islam dan negara mulai memburuk. Hal ini ditandai dengan otoritas Soekarno

pada tahun 1960 yang memberinya otoritas untuk melarang dan membubarkan partai-partai yang menentang negara. Politik Islam semakin melemah dengan dibubarkannya PSI dan Masyumi pada 17 Agustus 1960, hal ini dikarenakan PSI dan Masyumi tidak mengeksekusi anggota yang memberontak secara tegas (Ken Ward 2010), sehingga dianggap adanya keterlibatan para pemimpin Masyumi dengan pemberontakan daerah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) atau Permesta (Perjuangan Semesta Alam) (Sukron Kamil 2013).

Keputusan dibubarkannya Masyumi dan PSI dari partai resmi bangsa secara simbolik menunjukkan bahwa nasionalis Islam berhasil dikalahkan. Namun, di antara kedua partai tersebut dan partai-partai lainnya yang mulai memudar, NU justru lebih dekat dengan Soekarno. Hal ini disebabkan karena dalam banyak hal, NU dan PNI memiliki banyak kesamaan ketimbang dengan Masyumi. Kedua partai ini mempunyai basis yang kuat di Jawa dan mencakup nilai-nilai Jawa, serta lebih menghargai gaya kepemimpinan tradisional dari pada cita-cita demokrasi Barat (Martin van Bruinessen 1999). Namun, pada akhirnya partai NU pun jatuh di panggung perpolitikan bersama dengan gagalnya pemberontakan PKI pada 1965 (Mochamad Parmudi 2014).

#### *Pasca Kemerdekaan; Orde Baru*

Gagalnya kudeta PKI di tahun 1965 dan turunnya mandat dari Soekarno kepada Soeharto yang dikenal dengan dengan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966) menandai berakhirnya Orde Lama dan digantikan oleh Orde Baru (Okrisal Eka Putra 1995). Berbeda dengan Orde Lama, Orde Baru menggunakan cara berpikir yang berorientasi pada program. Belajar dari Orde Lama, pemerintahan terlalu sibuk dengan orientasi ideologi dalam hal pembangunan, sehingga menyebabkan kehancuran ekonomi karena perdebatan ideologi yang sengit. Oleh karena itu untuk memperbaiki pembangunan ekonomi, industrialisasi atau pemenuhan kebutuhan dasar rakyat masa depan Indonesia harus bebas dari politik yang didasarkan kepada ideologi (M. Syafi'i Anwar 1995).

Hal inilah yang menjadikan umat Islam merasa kecewa di masa Orde Baru. Pada awalnya pemimpin-pemimpin Muslim mengira bahwa dengan bergantinya Orde Lama dapat memberikan kesempatan untuk

mengembalikan kekuatan politik Islam dan mulai menyusun rencana agar syari'at Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan (Mochamad Parmudi 2014).

Sebagai “Balas Budi” pemerintah Orde Baru atas partisipasi umat Islam dalam perjuangan melwan komunis, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) diizinkan oleh Soeharto berdasarkan Keputusan Presiden, No. 70, pada 20 Februari 1968 yang menyatakan bahwa Parmusi merupakan sebuah persatuan organisasi sosial Islam yang tidak tergabung dalam partai politik (Ken Ward 2010). Namun, partai ini dipenuhi dengan konflik yang terjadi di dalam tubuh Parmusi sendiri. Pertikaian antara John Naro-Imran Kadir dan Djarnawi Hadikusuma-Lukman Harun mendorong pemerintah untuk turun tangan secara langsung dan memutuskan untuk menggantikan pimpinan Parmusi yang lama, Djarnawi Hadikusumo, kepada H.M.S Mintareja (M. Syafi'i Anwar 1995).

Keputusan pemerintah, bagi sebagian kelompok seperti Muhammadiyah dan Keluarga Bulan Bintang justru mengecewakan. Keadaan tersebut terus berlanjut sampai menjelang pelaksanaan pemilihan umum pertama kali di era Orde Baru. Pemilu pertama tersebut yang dilaksanakan pada 1971 diikuti oleh 3 arus kekuatan politik. Kekuatan politik Islam diwakili oleh Parmusi, NU, PSII dan Perti, kemudian kekuatan nasionalis dan Kristen diwakili oleh PNI, IPKI, Parkindo, Partai Murba dan Partai Katolik, serta kekuatan nasionalis-pemerintah diwakili oleh Golkar (Mochamad Parmudi 2014). Golkar memenangkan mayoritas suara di setiap provinsi, kecuali di Aceh, Jakarta dan Maluku dan tetap mendapatkan suara terbanyak, yaitu 62,8% (M.C. Ricklefs 2001).

Pada bulan Januari 1973, pemerintah mendesak partai-partai yang ada dilebur menjadi 2 partai. Partai-partai Islam seperti NU dan Parmusi dilebur menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan partai yang berbasis nasionalis dan non-Islam diantaranya Murba, PNI, Katolik, Kristen dan IPKI dientuk PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Selanjutnya pada bulan Maret 1973, MPR baru menunjuk Soeharto untuk memimpin Indonesia sebagai Presiden untuk kedua kalinya (M.C. Ricklefs 2001).

Sepanjang 32 tahun masa Orde Baru, hubungan Islam dan negara dapat dibedakan menjadi 2 periode. *Pertama*, periode antagonistik (1966-1985). Periode ini terdiri dari dua babak. Babak pertama yaitu hingga tahun 1981, dimana ketika umat Islam secara bulat menentang dan bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam. Di antara aspirasi tersebut adalah menolak rehabilitasi Masyumi, melarang adanya PDII (Partai Demokrasi Islam Indonesia) yang digagas oleh Moh. Hatta, rumusan rancangan undang-undang tentang perkawinan, mengganti pelajaran agama dengan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, melarang siswi Muslimah menggunakan hijabnya, dan legislasi perjudian oleh negara. Babak kedua dari periode ini adalah tahun 1982-1985, dimana umat Islam mulai sejalan dalam merespon kebijakan Orde Baru, meskipun ada sebagian yang masih bersikap oposisi dan sebagiannya lagi lunak dengan kebijakan negara. Hal ini dikarenakan banyak cendekiawan dan kelas menengah umat Islam yang masuk dalam jajaran pemerintahan, serta Orde Baru memandang bahwa Islam adalah kekuatan yang tidak bisa dinafikan, dan harus lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan-kebijakan (Mochamad Parmudi 2014).

*Kedua*, periode akomodatif (1985-1998). Pada periode ini pemerintah menunjukkan sikap akomodatif terhadap Islam. Di antara sikap tersebut adalah banyak dari kalangan Muslim yang menduduki jabatan di berbagai lembaga. Hal ini tidak terlepas dari usaha Nurcholis Madjid dalam mencairkan hubungan antara Islam dan negara yang dikenal dengan Islam kultural. Hingga pada tahun 1990, pemerintah dan umat Islam menjalani hubungan yang mesra, ketika para tokoh Muslim banyak memegang jabatan yang strategis di pemerintahan. Namun, jika diakumulasikan hubungan Islam dan pemerintah dari masa orde lama hingga orde baru menunjukkan bahwa politik Islam kurang leluasa dalam mengapresiasi gagasan-gagasannya. Sehingga pada masa orde baru Islam politik yang diartikan sebagai gerakan umat Islam dalam mengapresiasi gagasan-gagasannya melalui saluran perpolitikan mengganti strateginya yang menitikberatkan pada Islam kultural. Hal ini dilakukan para cendekiawan

Muslim untuk menghilangkan stigma negatif akan radikalisme politik Islam selama masa orde lama (Mochamad Parmudi 2014).

### ***Islam Kultural dan Pengaruhnya terhadap Politik Islam***

Islam Kultural sebagai sebuah gerakan dimulai sejak tahun 1980-an lebih terlihat muncul sebagai sebuah mainstream ( arus utama) pemikiran dari pada sebuah gerakan yang tampak secara fisik, namun dampaknya dapat dirasakan terutama dalam menimbulkan wacana publik dan penyadaran terhadap umat dalam menyikapi permasalahan sosial di sekitarnya. Islam kultural pertama kali digagas oleh Nurcholish Madjid (cak nur) pada masa orde baru, dalam pidatonya tanggal 2 Januari 1970, menyimpulkan bahwa dia merasa yakin bahwa Islam tidak mungkin lagi akan mendapatkan kekuatan politik, jika masih mengharapkan diwujudkan dalam jalur partai politik praktis. Dalam kaitan untuk menjaga kepentingan dan kesinambungan perkembangan umat, dia menyerukan “Islam Yes, Partai Islam, No” sebuah seruan deIslamisasi partai politik, melalui program yang disebutnya “sekularisasi” (Siti Nadroh 1999). Nurcholish Madjid menyebutkan definisi yang diberikan oleh Harvey Cox mengenai “sekularisasi” dan “sekularisme” (Nurcholish Madjid 1993) yaitu Sekularisasi sebagai istilah deskriptif mempunyai arti yang luas dan mencakup. Ia muncul dalam samaran-samaran yang berbeda-beda, tergantung kepada sejarah keagamaan dan politik suatu daerah yang dimaksudkan. Namun, di manapun ia timbul, harus dibedakan dari sekularisme. Sekularisasi adalah perkembangan pembebasan. Sedangkan sekularisme adalah nama untuk suatu ideologi, suatu pandangan dunia baru yang tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama baru. Salah satu kesadaran yang sangat berakar dalam pandangan seorang Muslim adalah bahwa agama Islam itu sebuah agama yang universal, yang relevan untuk setiap zaman dan tempat, serta cocok sekalian umat manusia (Muhammad Wahyuni Nafis 2014).

Pemberian nama Islam kultural nampaknya ingin mengkontraskan dengan Islam politik. Namun demikian, kemunculan Islam kultural sebenarnya bukan untuk menegasikan Islam politik melainkan sebuah solusi atau alternatif atas kebuntuan Islam politik di

Indonesia, baik pada masa awal kemerdekaan, revolusi, Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, dan awal Orde Baru.

Islam kultural mempunyai arti bahwa Islam merupakan salah satu komponen yang membentuk, melandasi, dan mengarahkan bangsa dan negara. Dalam hal ini, Islam kultural tidak mengharuskan terbentuknya negara Islam. Yang paling penting menurut Islam kultural adalah dilaksanakannya nilai-nilai substansi Islam yaitu keadilan, kesamaan, partisipasi, dan musyawarah (Bahtiar Effendy 1998). Dengan menolak partai politik sebagai wahana pokok perjuangan Islam, Nurcholish Madjid secara tegas menentang gagasan negara Islam. Gagasan Nurcholish Madjid ini menitikberatkan pada usaha pembaruan keagamaan dan etika serta membuka diri terhadap kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat di luar umat Islam.

Nurcholish Madjid mengatakan:” Karena itu kini bangsa Indonesia sangat *comfortable* dengan gagasan mereka berkenaan dengan hubungan antara agama dan negara yang didasarkan pada Pancasila sebagai titik temu antara seluruh golongan.” (Nurcholish Madjid 1995) dapat disimpulkan bahwa bagi Nurcholish Madjid negara Pancasila adalah bentuk final bagi bangsa Indonesia, sehingga umat Islam tidak perlu mendirikan negara Islam. Yang paling penting, kata Nurcholish Madjid, adalah bagaimana setiap undang-undang yang disusun di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai kelslaman.

Dengan Islam kultural maka Pancasila dapat diterima dengan damai oleh umat Islam. Menurut Jalaluddin Rahmat, pemikiran Nurcholish Madjid telah menyebabkan ormas-ormas Islam yang telah menerima Pancasila sebagai asas organisasinya merasa “lebih damai karena menemukan kebenaran.” (Nurcholish, yang Menarik Gerbong 1986) konsep Islam kultural yang dirumuskan Nurcholish Madjid terutama mengenai istilah “sekularisasi” terlihat jelas bahwa dia banyak mengutip pendapat-pendapat ilmuwan Barat, seperti Robert N. Bellah, Harvey Cox, dan Talcot Parsons. Sekularisasi dari ilmuwan Barat karena istilah sekularisasi memang muncul dari sana. Oleh karena itu, pengambilan istilah sekularisasi dari Barat merupakan hal yang biasa dan wajar. Namun demikian, secara keseluruhan Nurcholish Madjid nampaknya banyak dipengaruhi oleh seorang ilmuwan Islam yang

banyak mengkritik ilmuwan lainnya yang dia anggap “menyimpang” dari Al-Quran dan Hadits yaitu Ibn Taimiyah (Ensiklopedi Islam 1994).

Kesimpulan menurut Nurcholish Madjid terdapat perbedaan cukup prinsipal antara pengertian “sekularisasi” secara sosiologis dan secara filosofis. Dan karena sedemikian kontroversialnya istilah “sekular”, “sekularisasi”, dan “sekularisme” itu, maka dia berkata “adalah bijaksana untuk tidak menggunakan istilah-istilah tersebut, dan lebih baik menggantikannya dengan istilah-istilah teknis lain yang lebih tepat dan netral” (Budy Rachman 2006).

Kemudian pemikiran Cak Nur itu di lanjutkan oleh Abdurrahman Wahid (Presiden ke-4 RI) dengan sebutan pribumisasi. Dalam “Pribumisasi Islam” tergambar bagaimana ajaran Islam yang bersifat normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa hilangnya identitas masing-masing sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau menyamakan dengan praktek keagamaan masyarakat Muslim di Timur Tengah. Menurut Abdurrahman Wahid sendiri, Arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah berarti tercabutnya masyarakat dari akar budaya sendiri (Naupal 2019).

Gagasan Gus dur ini berangkat dari komitmennya yang tinggi terhadap nilai-nilai universal Islam dan khazanah pemikiran Sunni tradisional sebagai sesuatu yang dianggapnya mempunyai kemampuan untuk membangun harmoni sosial, toleransi, serta membangun basis-basis kehidupan politik yang egaliter, adil, dan demokratis. Gagasan yang lebih menitikberatkan kepada substansi dari pada simbol atau bentuk formal negara ini sempat ditinggalkan oleh para tokoh Islam, terutama karena mereka terlalu disibukkan oleh polemik tentang berbagai bentuk formal negara dalam suasana konfrontasi penuh ketegangan dan sikap saling curiga sejak awal.

### *Islam dan Budaya*

Jika melihat kebelakang meninjau juga dari historis Islam di Indonesia, yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia yang dikenal dengan nama guru-guru pengembara dengan karakteristik sufi yang kita kenal selama ini yaitu wali songo yang telah berusaha mengadopsi budaya lokal secara selektif sehingga ajaran Islam dapat diterima tanpa

kehilangan esensi di satu sisi, sementara budaya lokal dapat berjalan sebagaimana adanya. Wali songo memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal dan menjadikannya sebagai sarana dakwah, tanpa mengubah format budaya lokal itu, sehingga demikian ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat (Azyumardi Azra 2013).

Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari kehidupan Islami melalui jalur non-politik, seperti dakwah Islam secara damai atau melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup dan sebagainya (Azyumardi Azra 2012). Proses akulturasi dan adaptasi antara unsur-unsur budaya yang satu dengan budaya yang lain atau dalam antropologi kultural disebut konsep integrasi kultural, ini tidak dapat dihindari karena pluralitas agama, budaya dan adat istiadat yang ada tidak-bisa-tidak saling bergesekan.

Ada kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal diakui dalam suatu kaidah (ketentuan dasar) dalam ilmu Ushul Fiqh, bahwa "*al-'adah muhakkamah,*" adat itu dihukumkan, atau lebih lengkapnya, "adat adalah syari'at yang dihukumkan" (*al-'adat syari'ah muhakkamah*), artinya adat dan kebiasaan suatu masyarakat yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum dalam Islam (Abi Bakar al-Ahdali al-Yamani as Syafi'i n.d.). Unsur-unsur budaya lokal yang dapat dijadikan sumber hukum adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip Islam dengan sendirinya harus dihilangkan dan diganti. Inilah makna kehadiran Islam di suatu tempat atau negeri.

Islam kultural mengandung pengertian bahwa sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam dilakukan melalui upaya-upaya yang menekankan pada perubahan kesadaran dan tingkah laku umat/masyarakat tanpa keterlibatan negara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sistem yang Islami (Masykuri Abdillah 2011).

Islam kultural adalah metode da'wah yang dipakai untuk mengajak masyarakat agar masuk Islam dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kultur atau budaya masyarakat setempat. Islam kultural memberikan keanekaragaman dalam mengajak masyarakat untuk mencintai dan mendalami Islam dengan

cara-cara yang tidak kaku dan menyesuaikan keadaan kebudayaan setempat sehingga Islam tidak lagi agama yang kaku dalam menyebarkan agama Islam. Kaku yang di maksud adalah penyebaran agama Islam tidak harus menggunakan metode atau cara yang dilakukan di negara Islam Timur Tengah dalam mensyi'arkan agama Islam.

Selain itu juga, Islam kultural dengan membawa konsep *culture* (budaya) berarti berniat menjadikan Islam sebagai sebuah cairan budaya yang merembes masuk ke setiap pori-pori kehidupan masyarakat Indonesia sehingga akan tercermin dari pola-pola perilaku keseharian umat yang berasaskan Islam. Gerakan Islam kultural yang dimulai sejak tahun 1980-an sebagai sebuah gerakan kaum cendikia yang mencoba memobilisasi pikiran masyarakat untuk tidak selalu terfokus pada gerakan politik yang hanya menimbulkan perpecahan, sesuai dengan pendapat Buya Syafi'i Ma'arif yang menyatakan:

“Politik hanya memecah belah dan menciptakan lawan, sedangkan dakwah berkeinginan merangkul dan memperbanyak kawan. Tentu hal itu tidak bisa dipungkiri begitu saja, sebab dengan berpolitik umat menjadi miopis, hanya mampu melihat realitas-realitas jangka pendek.”

Kalangan kaum Muslim Indonesia kebanyakan belum jelas benar. Ketidakjelasan itu dengan sendirinya berpengaruh langsung kepada bagaimana penilaian tentang absah atau tidaknya suatu ekspresi kultural yang khas Indonesia, bahkan mungkin khas daerah tertentu di Indonesia. Antara agama dan budaya tidaklah dapat dipisahkan. Tetapi juga telah diinsafi oleh banyak ahli, agama dan budaya itu, meskipun tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan, dan tidak dibenarkan mencampuradukkan di antara keduanya. Agama *an sich* bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Tetapi budaya, sekalipun yang berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sementara kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak pernah terjadi sebaliknya, yaitu agama berdasarkan agama. Sekurangnya begitulah menurut keyakinan berdasarkan kebenaran wahyu Tuhan kepada para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu agama adalah primer, dan budaya adalah skunder. Budaya dapat merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena

itu *sub-ordinate* terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya. Maka, sementara agama adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, budaya adalah relatif, terbatas oleh ruang dan waktu (Nurcholish Madjid 1995).

### *Pengaruh Islam Kultural*

Gagasan Islam kultural yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid ternyata memiliki pengaruh positif yang cukup besar bagi perkembangan umat Islam pada masa Orde Baru. Namun demikian, ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa gagasan Islam kultural tidak memberikan pengaruh terhadap umat Islam. Menurut mereka, pemikiran Nurcholish Madjid hanya memberikan pengaruh kepada kalangan tertentu saja, misalnya terhadap kalangan intelektual Islam, sementara terhadap masyarakat luas pemikiran Islam kultural Nurcholish Madjid tidak memberikan pengaruh apa-apa.

Aminuddin berpendapat, walaupun gagasan Islam kultural telah dikumandangkan Nurcholish Madjid sejak awal 1970-an, tepatnya tanggal 2 Januari 1970, gagasan ini kurang efektif mempengaruhi agenda strategi politik umat Islam hingga penghujung dasawarsa 1970-an. Menurutnya disebabkan dengan tiga hal (Aminudin 1999) yaitu; *pertama*, gerakan pemikiran yang dipelopori Nurcholish Madjid masih bersifat elitis karena hanya mengandalkan jurnal-jurnal ilmiah dan diskusi-diskusi terbatas sebagai sarana penyebaran idenya. *Kedua*, seruan Nurcholish Madjid kepada kaum Muslim agar tidak terlalu mengandalkan perjuangan pada medan politik partisan tenggelam oleh perdebatan pemikiran teologinya di masyarakat. *Ketiga*, masih kuatnya pengaruh penganut strategi lama dalam tubuh kaum Muslimin seperti terlihat dalam Pemilu 1971 dan 1977. Sementara Nurcholish Madjid sendiri, sebagai pioner pemikiran “Islam Yes, Partai Islam No” malah terlibat kampanye PPP dalam pemilu 1977. Menurut Aminuddin, gerakan Islam kultural baru mulai memiliki pengaruh yang berarti setelah Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan melakukan langkah-langkah konkret gerakan Islam kultural dengan memulai serangkaian rekayasa di NU.

Gagasan Islam kultural kemudian berkembang ke seluruh masyarakat luas seiring dengan perkembangan gerakan pembaruan di

dalam NU. Tokoh utama yang menjadi penggerak gerakan pembaruan dalam tubuh NU adalah Abdurrahman Wahid. Menurut Dawam Rahardjo, gagasan Islam kultural Nurcholish Madjid ini diikuti oleh NU dengan gerakan “Kembali kepada Khittah 1926” dalam Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984 dan Muhammadiyah dengan wacana “Masyarakat Utama”, walaupun dengan dalih lain. Dengan masuknya kedua organisasi ini ke dalam gerbang Islam kultural maka secara tidak langsung membuktikan bahwa kemajuan Islam lebih banyak dicapai melalui kegiatan kemasyarakatan daripada kegiatan politik (Dawam Rahardjo 2004).

Sementara itu menurut Azyumardi Azra, Islam kultural berhasil memberikan pengaruhnya bagi kemajuan umat Islam Indonesia, seperti terbentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Bank Muamalat, BPR Syari’ah, pelaksanaan Festival Istiqlal, dan Penetapan UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Peradilan Agama yang mengakui eksistensi dan aspirasi umat Islam. Pada saat yang sama, kegiatan-kegiatan dakwah juga semakin intensif dan ekstensif (Azyumardi Azra 2000). Pengaruh lainnya menurut Bahtiar Effendi yang dikutip oleh Muhammad Parmudi, bahwa dengan gagasan Nurcholis Madjid, banyak cendekiawan Muslim yang memegang jabatan di pemerintahan. Selain itu, inspirasi dari gagasannya sebagai respons positif yaitu banyak tokoh Muslim yang muncul ke permukaan dan melakukan pergerakan tanpa membawa atribut Islam. Hal ini dilakukan oleh organisasi HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) yang mengenyam pendidikan di luar maupun di dalam negeri. Di antara tokoh-tokoh Muslim yang masuk dalam mesin pemerintahan Orde Baru adalah Abdul Gafur, Akbar Tandjung, Busthanul Arifin, Saleh Afiff, Azwar Anas, Hasjrul Harahap, Arifin M. Siregar, Syamsuddin Sumintapura, Sa’adillah Mursyid, Syafruddin Baharsyah, Tarmizi Taher, dan Mar’ie Muhammad adalah tokoh-tokoh HMI yang masuk ke dalam mesin birokrasi Orde Baru (Mochamad Parmudi 2014).

## **PENUTUP**

Islam dan politik di Indonesia telah bersentuhan sejak adanya jejak penyebaran dan proses Islamisasi di tanah air ini. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorakkan Islam. Pada

perkembangannya, Islam politik mengalami sejarah yang panjang dan memiliki peran besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Islam politik atau politik Islam memiliki makna yang sama dalam makalah ini, yaitu segala apresiasi umat Islam, baik itu gagasan maupun pergerakan yang dilakukan melalui jalur perpolitikan Indonesia. Problematika yang dihadapi oleh politik Islam mengalami pasang surut karena gagasannya mengenai dasar negara Indonesia yang harus berlandaskan asas Islam. Hal tersebut selalu berbenturan dengan nasionalis sekuler yang menginginkan pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Benturan tersebut akhirnya melahirkan Islam kultural yang berpandangan bahwa sosialisasi ajaran Islam lebih menitikberatkan pada persoalan tingkah laku secara kultur tanpa melibatkan negara atau sistem pemerintahan.

## **REFERENSI**

- Abdurrahman Wahid. 1989. "Islam Dan Masyarakat Bangsa." *Pesantren* VI(3): 11–11.
- Abi Bakar al-Ahdali al-Yamani as Syafi'i. *Al-Faraid al-Bahiyah*. Kudus: Menara Kudus.
- Adam Scharz. 2000. *A Nation in Waiting; Indonesia's Search for Stability*. United States of America: Westview Press.
- Ahmad Fuad Fanani, Muhd. Abdullah Darraz. 2013. "Membaca Ulang Ekspresi Politik Umat Islam; Sebuah Pengantar." *MAARIF* 8(2): 4.
- Aminudin. 1999. *Kekuatan Islam Dan Pergulatan Kekuasaan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azyumardi Azra. 2000. *Islam Di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi*, Dalam Abdul Mu'nim D.Z (Editor), *Islam Di Tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- . 2012. "Revisitasi Islam Politik Dan Islam Kultural Di Indonesia ." *Indo-Islamika* 1(2): 233.
- . 2013. "Islam Dan Budaya Lokal." *Yayasan Abad Demokrasi*.
- Badri Yatim. 2010. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bahtiar Effendy. 1998. *Islam Dan Negara, Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Bernard H. M. Vlekke. 2008. *Nusantara; Sejarah Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

- Budy Rachman. 2006. *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*. Bandung: Mizan.
- Dawam Rahardjo. 2004. *Kata Pengantar: Islam Kultural Dalam Perspektif Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Didin Saefuddin Buchori. 2009. *Sejarah Politik Islam*. Jakarta: Pustaka Intermedia.
- Edi Subroto. 2007. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Solo: LPP dan UPT Penerbit dan Pencetakan UNS.
- Einahar Sitompul. 1989. *NU Dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Kripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- "Ensiklopedi Islam." 1994. *Ensiklopedi Islam 2*: 168–71.
- Faisal Ismail. 1995. *Islam, Politics and Ideology in Indonesia; A Study of The Process of Muslim Acceptance of The Pancasila*. Canada: Montreal.
- Greg Barton. 2002. *Abdurrahman Wahid; Muslim Democrat, Indonesian President*. Australia: UNSW Press book.
- Harold Coward. 1997. *Setting the Research For Canadian Religious Pluralism*. TTP: ARC 25.
- Ken Ward. 2010. *The Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.
- Kun Zachrun Istanti. 2010. *Metode Penelitian Filologi Dan Penerapannya*. Yogyakarta: Elmatara.
- Louis Gottschalk. 1975. *Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah*. ed. terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- M. Amin Abdullah. 2006. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Syafii Anwar. 1995. *Pemikiran Dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Martin van Bruinessen. 1999. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LkiS.
- Masykuri Abdillah. 2011. *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. Jakarta: : PT Gramedia Pustaka Utama.
- M.C. Ricklefs. 2001. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. London: Palgrave.
- Mochamad Parmudi. 2014. *Islam Dan Demokrasi Di Indonesia; Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam*. Semarang.
- Muhammad Wahyuni Nafis. 2014. *Cak Nur, Sang Guru Bangsa*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Naupal. 2019. *Islam Kultural Dan Islam Fundamental Di Indonesia*. Jakarta: UI.

- Nurcholis Madjid. 2008. *Islam, Kemodernan Dan Keindonesiaan*. XI. Bandung: Mizan.
- Nurcholish Madjid. 1993. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- . 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina.
- “Nurcholish, Yang Menarik Gerbong.” 1986. *Tempo*: 57.
- Okrisal Eka Putra. 1995. “Hubungan Islam Dan Politik Masa Orde Baru.” *Jurnal Dakwah* ix(2): 19–20.
- Siti Nadroh. 1999. *Wacana Keagamaan Dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukamto. 2008. *Dinamika Politik Islam Di Indonesia; Dari Masa Orde Baru Sampai Masa Reformasi*. Bandung: Enlightenment.
- Sukron Kamil. 2013. *Islam Dan Politik Di Indonesia Terkini; Islam Dan Negara, Dakwah Dan Politik, HMI, Anti-Korupsi, Demokrasi, NI, MMI, Dan Perda Syari’ah*. Ciputat: Pusat Studi Indonesia dan Arab.
- Umaruddin Masdar. 1999. *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaprul Khan. 2013. “Dinamika Pemikiran Politik Islam Di Indonesia.” *Jurnal Review Politik* 3(2): 156–57.